

Nomor : B-DI.01.01/6331/2023 Jakarta, 29 Desember 2023

Sifat : Biasa

Hal : Penutupan Akses Sementara Aplikasi SRIKANDI Versi 2

Yth.

Pimpinan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (sebagaimana daftar lampiran)

di

Tempat

Dalam rangka implementasi Aplikasi SRIKANDI Versi 3 dan berakhirnya pemeliharaan Aplikasi SRIKANDI Versi 2 pada akhir Desember 2023, diperlukan migrasi data dari Aplikasi SRIKANDI Versi 2 ke Aplikasi SRIKANDI Versi 3. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- Pelaksanaan migrasi data dari Aplikasi SRIKANDI Versi 2 ke Aplikasi SRIKANDI Versi 3 dilaksanakan mulai tanggal 29 Desember 2023 pukul 23.59 WIB sampai dengan 1 Januari 2024 Pukul 23.59 WIB;
- 2. Selama pelaksanaan migrasi data maka akan berdampak pada ditutupnya akses Aplikasi SRIKANDI Versi 2 (*Live* dan Bimtek);
- 3. Pada tanggal 2 Januari 2024 Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (IPPD) dapat melakukan pengecekan hasil *migrasi* data pada Aplikasi SRIKANDI Versi 3 dengan tautan https://srikandi-v3-bimtek.arsip.go.id dengan menggunakan akun Aplikasi SRIKANDI Versi 2 *live*;
- 4. Penutupan akses Aplikasi SRIKANDI Versi 2 secara permanen *(cut off)* akan disampaikan pada tanggal 2 s.d. 4 Februari 2024;
- 5. Aplikasi SRIKANDI Versi 2 digunakan untuk pelaksanaan administrasi kedinasan sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;
- 6. Penggunaan Aplikasi SRIKANDI Versi 3 *liv*e akan dimulai pada tanggal 5 Februari 2024;

-2-

7. Pelaksanaan pengendalian naskah kedinasan selama tanggal 30 Desember s.d. 1 Januari 2024 menggunakan aplikasi yang berlaku di masing-masing IPPD atau secara manual.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Plt. Kepala,



Imam Gunarto

-3-

Lampiran Surat Kepala

Nomor : B-DI.01.01/6331/2023 Tanggal : 29 Desember 2023

DAFTAR TUJUAN SURAT

Instansi Pusat

- 1. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
- 2. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
- 3. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
- 4. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
- 5. Kementerian Sekretariat Negara
- 6. Kementerian Dalam Negeri
- 7. Kementerian Luar Negeri
- 8. Kementerian Pertahanan
- 9. Kementerian Agama
- 10. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- 11. Kementerian Keuangan
- 12. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- 13. Kementerian Kesehatan
- 14. Kementerian Sosial
- 15. Kementerian Ketenagakerjaan
- 16. Kementerian Perindustrian
- 17. Kementerian Perdagangan
- 18. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- 19. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- 20. Kementerian Perhubungan
- 21. Kementerian Komunikasi dan Informatika
- 22. Kementerian Pertanian
- 23. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- 24. Kementerian Kelautan dan Perikanan
- 25. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

- 26. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
- 27. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- 28. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- 29. Kementerian Badan Usaha Milik Negara
- 30. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
- 31. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif /Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- 32. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- 33. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
- 34. Kementerian Pemuda dan Olahraga
- 35. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
- 36. Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- 37. Badan Informasi Geospasial (BIG)
- 38. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (BAKAMLA)
- 39. Badan Kepegawaian Negara (BKN)
- 40. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
- 41. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
- 42. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
- 43. Badan Narkotika Nasional (BNN)
- 44. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
- 45. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
- 46. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)
- 47. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
- 48. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)
- 49. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM)
- 50. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)
- 51. Badan Pertanahan Nasional (BPN)
- 52. Badan Pusat Statistik (BPS)
- 53. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS)
- 54. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
- 55. Badan Standardisasi Nasional (BSN)
- 56. Lembaga Administrasi Negara (LAN)

- 57. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
- 58. Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas)
- 59. Perpustakaan Nasional (PERPUSNAS)
- 60. Badan Pangan Nasional (BAPANAS)
- 61. Tentara Nasional Indonesia
- 62. Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 63. Badan Intelijen Negara
- 64. Kejaksaan Agung Republik Indonesia
- 65. Sekretariat Kabinet
- 66. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
- 67. Badan Riset dan Inovasi Nasional
- 68. Otorita Ibu Kota Nusantara
- 69. Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat
- 70. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat
- 71. Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah
- 72. Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung
- 73. Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi
- 74. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial
- 75. Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan
- 76. Televisi Republik Indonesia
- 77. Radio Republik Indonesia
- 78. Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia
- 79. Badan Amil Zakat Nasional
- 80. Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu
- 81. Badan Nasional Pengelola Perbatasan
- 82. Badan Nasional Sertifikasi Profesi
- 83. Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur
- 84. Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba
- 85. Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores
- 86. Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua
- 87. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi
- 88. Badan Pengatur Jalan Tol
- 89. Badan Pengawas Pemilihan Umum

- 90. Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia
- 91. Badan Pengembangan Kewirausahaan Nasional
- 92. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
- 93. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan
- 94. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun
- 95. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
- 96. Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan
- 97. Badan Perlindungan Konsumen Nasional
- 98. Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara
- 99. Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional
- 100. Badan Restorasi Gambut dan Mangrove
- 101. Dewan Energi Nasional
- 102. Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan
- 103. Dewan Insinyur Indonesia
- 104. Dewan Jaminan Sosial Nasional
- 105. Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
- 106. Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan
- 107. Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun
- 108. Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
- 109. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
- 110. Dewan Ketahanan Nasional
- 111. Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus
- 112. Dewan Nasional Keuangan Inklusif
- 113. Dewan Pengupahan Nasional
- 114. Dewan Pers
- 115. Dewan Pertahanan Nasional
- 116. Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah
- 117. Dewan Pertimbangan Presiden
- 118. Dewan Sumber Daya Air Nasional

- 119. Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional
- 120. Kantor Staf Presiden
- 121. Komisi Aparatur Sipil Negara
- 122. Komisi Banding Merek
- 123. Komisi Banding Paten
- 124. Komisi Informasi Pusat
- 125. Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik
- 126. Komisi Kejaksaan
- 127. Komisi Kepolisian Nasional
- 128. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan
- 129. Komisi Nasional Disabilitas
- 130. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
- 131. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 132. Komisi Pemilihan Umum
- 133. Komisi Pengawas Persaingan Usaha
- 134. Komisi Penyiaran Indonesia
- 135. Komisi Penyuluhan Nasional
- 136. Komisi Perlindungan Anak Indonesia
- 137. Komite Akreditasi Nasional
- 138. Komite Anti Dumping Indonesia
- 139. Komite Industri Nasional
- 140. Komite Kebijakan Industri Pertahanan
- 141. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah
- 142. Komite Nasional Keamanan Penerbangan
- 143. Komite Nasional Keselamatan Transportasi
- 144. Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia
- 145. Komite Pengawas Perpajakan
- Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas
- 147. Komite Perdagangan Nasional
- 148. Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan
- 149. Komite Profesi Akuntan Publik
- 150. Konsil Kedokteran Indonesia
- 151. Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia

-8-

- 152. Lembaga Kerja Sama Tripartit
- 153. Lembaga Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
- 154. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
- 155. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
- 156. Lembaga Produktivitas Nasional
- 157. Lembaga Sensor Film
- 158. Majelis Pertimbangan Tenaga Nuklir
- 159. Ombudsman Republik Indonesia
- 160. Otoritas Nasional Senjata Kimia
- 161. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Pemerintah Daerah Provinsi

- 1. Provinsi Aceh
- 2. Provinsi Sumatera Utara
- 3. Provinsi Sumatera Barat
- 4. Provinsi Riau
- 5. Provinsi Kepulauan Riau
- 6. Provinsi Jambi
- 7. Provinsi Bengkulu
- 8. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
- 9. Provinsi Sumatera Selatan
- 10. Provinsi Lampung
- 11. Provinsi Banten
- 12. Provinsi DKI Jakarta
- 13. Provinsi Jawa Barat
- 14. Provinsi Jawa Tengah
- 15. Provinsi D.I Yogyakarta
- 16. Provinsi Jawa Timur
- 17. Provinsi Bali
- 18. Provinsi Kalimantan Barat
- 19. Provinsi Kalimantan Selatan
- 20. Provinsi Kalimantan Tengah
- 21. Provinsi Kalimantan Utara
- 22. Provinsi Kalimantan Timur
- 23. Provinsi Nusa Tenggara Barat
- 24. Provinsi Nusa Tenggara Timur
- 25. Provinsi Gorontalo
- 26. Provinsi Sulawesi Selatan
- 27. Provinsi Sulawesi Tenggara
- 28. Provinsi Sulawesi Tengah
- 29. Provinsi Sulawesi Utara
- 30. Provinsi Sulawesi Barat
- 31. Provinsi Maluku

-10-

- 32. Provinsi Maluku Utara
- 33. Provinsi Papua
- 34. Provinsi Papua Barat
- 35. Provinsi Papua Barat Daya
- 36. Provinsi Papua Tengah
- 37. Provinsi Papua Pegunungan
- 38. Provinsi Papua Selatan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- 1. Kabupaten Aceh Tengah
- 2. Kabupaten Aceh Utara
- 3. Kabupaten Aceh Timur
- 4. Kabupaten Bireun
- 5. Kabupaten Aceh Tamiang
- 6. Kabupaten Aceh Barat
- 7. Kabupaten Pidie
- 8. Kabupaten Nagan Raya
- 9. Kabupaten Gayo Lues
- 10. Kabupaten Aceh Singkil
- 11. Kota Langsa
- 12. Kabupaten Bener Meriah
- 13. Kota Subulussalam
- 14. Kota Banda Aceh
- 15. Kota Lhokseumawe
- 16. Kabupaten Aceh Jaya
- 17. Kabupaten Aceh Besar
- 18. Kabupaten Pidie Jaya
- 19. Kabupaten Aceh Selatan
- 20. Kota Sabang
- 21. Kabupaten Aceh Barat Daya
- 22. Kabupaten Aceh Tenggara
- 23. Kabupaten Simeulue
- 24. Kabupaten Deli Serdang

- 25. Kota Medan
- 26. Kabupaten Langkat
- 27. Kota Tebing Tinggi
- 28. Kabupaten Karo
- 29. Kabupaten Serdang Bedagai
- 30. Kabupaten Labuhan Batu Selatan
- 31. Kabupaten Labuhan Batu Utara
- 32. Kabupaten Dairi
- 33. Kabupaten Padang Lawas Utara
- 34. Kota Tanjung Balai
- 35. Kabupaten Samosir
- 36. Kabupaten Labuhan Batu
- 37. Kota Sibolga
- 38. Kabupaten Humbang Hasundutan
- 39. Kabupaten Simalungun
- 40. Kota Pematang Siantar
- 41. Kabupaten Batubara
- 42. Kota Binjai
- 43. Kabupaten Tapanuli Tengah
- 44. Kabupaten Padang Lawas
- 45. Kabupaten Toba
- 46. Kabupaten Asahan
- 47. Kabupaten Tapanuli Selatan
- 48. Kabupaten Mandailing Natal
- 49. Kabupaten Nias Selatan
- 50. Kabupaten Nias Utara
- 51. Kota Gunungsitoli
- 52. Kabupaten Nias
- 53. Kabupaten Nias Barat
- 54. Kabupaten Pakpak Bharat
- 55. Kabupaten Tapanuli Utara
- 56. Kota Padang Sidempuan
- 57. Kota Payakumbuh

-12-

- 58. Kota Padang Panjang
- 59. Kabupaten Sijunjung
- 60. Kota Bukittinggi
- 61. Kabupaten Padangpariama N
- 62. Kabupaten Tanah Datar
- 63. Kota Padang
- 64. Kabupaten Pasaman Barat
- 65. Kabupaten Solok
- 66. Kota Solok
- 67. Kabupaten Dharmasraya
- 68. Kota Sawah Lunto
- 69. Kabupaten Agam
- 70. Kabupaten Pasaman
- 71. Kabupaten Pesisir Selatan
- 72. Kabupaten Lima Puluh Kota
- 73. Kabupaten Solok Selatan
- 74. Kabupaten Kepulauan Mentawai
- 75. Kota Pariaman
- 76. Kota Pekanbaru
- 77. Kabupaten Siak
- 78. Kabupaten Bengkalis
- 79. Kabupaten Indragiri Hulu
- 80. Kabupaten Rokan Hulu
- 81. Kabupaten Kampar
- 82. Kota Dumai
- 83. Kabupaten Pelalawan
- 84. Kabupaten Kepulauan Meranti
- 85. Kabupaten Indragiri Hilir
- 86. Kabupaten Rokan Hilir
- 87. Kabupaten Kuantan Singingi
- 88. Kota Tanjung Pinang
- 89. Kabupaten Bintan
- 90. Kota Batam

- 91. Kabupaten Lingga
- 92. Kabupaten Natuna
- 93. Kabupaten Karimun
- 94. Kabupaten Anambas
- 95. Kota Jambi
- 96. Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- 97. Kabupaten Merangin
- 98. Kabupaten Sarolangun
- 99. Kabupaten Batang Hari
- 100. Kabupaten Muaro Jambi
- 101. Kabupaten Tanjung Jabung Timur
- 102. Kabupaten Bungo
- 103. Kabupaten Tebo
- 104. Kota Sungai Penuh
- 105. Kabupaten Kerinci
- 106. Kabupaten Rejang Lebong
- 107. Kabupaten Bengkulu Utara
- 108. Kabupaten Lebong
- 109. Kota Bengkulu
- 110. Kabupaten Mukomuko
- 111. Kabupaten Seluma
- 112. Kabupaten Bengkulu Tengah
- 113. Kabupaten Kaur
- 114. Kabupaten Kepahiang
- 115. Kabupaten Bengkulu Selatan
- 116. Kabupaten Belitung Timur
- 117. Kota Pangkalpinang
- 118. Kabupaten Bangka
- 119. Kabupaten Bangka Selatan
- 120. Kabupaten Bangka Barat
- 121. Kabupaten Bangka Tengah
- 122. Kabupaten Belitung
- 123. Kabupaten Banyuasin

-14-

- 124. Kabupaten Musi Banyuasin (Migrasi)
- 125. Kota Lubuklinggau
- 126. Kota Palembang
- 127. Kabupaten Muara Enim
- 128. Kabupaten Ogan Komering Ulu
- 129. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
- 130. Kota Pagar Alam
- 131. Kabupaten Musi Rawas
- 132. Kota Prabumulih
- 133. Kabupaten Musi Rawas Utara
- 134. Kabupaten Empat Lawang
- 135. Kabupaten Ogan Komering Ilir
- 136. Kabupaten Lahat
- 137. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Pali)
- 138. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
- 139. Kabupaten Ogan Ilir
- 140. Kota Metro
- 141. Kabupaten Lampung Timur
- 142. Kota Bandar Lampung
- 143. Kabupaten Lampung Selatan
- 144. Kabupaten Lampung Tengah
- 145. Kabupaten Pringsewu
- 146. Kabupaten Pesawaran
- 147. Kabupaten Lampung Barat
- 148. Kabupaten Tanggamus
- 149. Kabupaten Mesuji
- 150. Kabupaten Tulang Bawang Barat
- 151. Kabupaten Way Kanan
- 152. Kabupaten Lampung Utara
- 153. Kabupaten Tulang Bawang
- 154. Kabupaten Pesisir Barat
- 155. Kabupaten Bekasi
- 156. Kabupaten Bogor

- 157. Kota Bogor
- 158. Kota Bandung
- 159. Kabupaten Bandung
- 160. Kabupaten Cirebon
- 161. Kota Cirebon
- 162. Kabupaten Sukabumi
- 163. Kbupaten Purwakarta
- 164. Kabupaten Subang
- 165. Kota Cimahi
- 166. Kabupaten Ciamis
- 167. Kota Sukabumi
- 168. Kabupaten Indramayu
- 169. Kota Tasikmalaya
- 170. Kota Depok
- 171. Kabupaten Tasikmalaya
- 172. Kabupaten Majalengka
- 173. Kabupaten Karawang
- 174. Kabupaten Garut
- 175. Kabupaten Cianjur
- 176. Kota Bekasi
- 177. Kabupaten Sumedang
- 178. Kabupaten Bandung Barat
- 179. Kabupaten Kuningan
- 180. Kota Banjar
- 181. Kabupaten Pangandaran
- 182. Kabupaten Tangerang
- 183. Kota Cilegon
- 184. Kota Tangerang
- 185. Kabupaten Lebak
- 186. Kabupaten Serang
- 187. Kabupaten Pandeglang
- 188. Kota Tangerang Selatan
- 189. Kota Serang

-16-

- 190. Kabupaten Kebumen
- 191. Kabupaten Magelang
- 192. Kabupaten Wonosobo
- 193. Kabupaten Pati
- 194. Kabupaten Klaten (Migrasi)
- 195. Kota Pekalongan
- 196. Kabupaten Purworejo
- 197. Kabupaten Pekalongan
- 198. Kota Magelang
- 199. Kabupaten Cilacap
- 200. Kabupaten Kudus
- 201. Kabupaten Blora
- 202. Kabupaten Boyolali
- 203. Kabupaten Jepara
- 204. Kota Surakarta
- 205. Kabupaten Purbalingga
- 206. Kabupaten Banyumas
- 207. Kabupaten Semarang
- 208. Kabupaten Demak
- 209. Kota Semarang
- 210. Kabupaten Kendal
- 211. Kota Salatiga
- 212. Kabupaten Wonogiri
- 213. Kabupaten Sragen
- 214. Kabupaten Karanganyar
- 215. Kabupaten Grobogan
- 216. Kabupaten Rembang
- 217. Kabupaten Batang
- 218. Kota Tegal
- 219. Kabupaten Temanggung
- 220. Kabupaten Tegal
- 221. Kabupaten Brebes
- 222. Kabupaten Pemalang

-17-

- 223. Kabupaten Banjarnegara
- 224. Kabupaten Sukoharjo
- 225. Kota Yogyakarta
- 226. Kabupaten Sleman
- 227. Kabupaten Bantul
- 228. Kabupaten Kulon Progo
- 229. Kabupaten Gunungkidul
- 230. Kota Surabaya
- 231. Kabupaten Probolinggo
- 232. Kabupaten Lamongan
- 233. Kabupaten Tulungagung
- 234. Kota Pasuruan
- 235. Kota Probolinggo
- 236. Kota Batu
- 237. Kabupaten Sidoarjo
- 238. Kabupaten Pasuruan
- 239. Kabupaten Mojokerto
- 240. Kabupaten Ponorogo
- 241. Kabupaten Madiun
- 242. Kabupaten Tuban
- 243. Kabupaten Nganjuk
- 244. Kota Blitar
- 245. Kabupaten Blitar
- 246. Kabupaten Malang
- 247. Kabupaten Gresik
- 248. Kabupaten Magetan
- 249. Kabupaten Lumajang
- 250. Kabupaten Pacitan
- 251. Kabupaten Sampang
- 252. Kabupaten Situbondo
- 253. Kota Madiun
- 254. Kabupaten Trenggalek
- 255. Kota Mojokerto

-18-

- 256. Kabupaten Kediri
- 257. Kabupaten Sumenep
- 258. Kota Kediri
- 259. Kabupaten Banyuwangi
- 260. Kabupaten Bondowoso
- 261. Kota Malang
- 262. Kabupaten Jombang
- 263. Kabupaten Bangkalan
- 264. Kabupaten Pamekasan
- 265. Kabupaten Bojonegoro
- 266. Kabupaten Jember
- 267. Kabupaten Ngawi
- 268. Kab Kepulauan Seribu
- 269. Kota Jakarta Pusat
- 270. Kota Jakarta Barat
- 271. Kota Jakarta Timur
- 272. Kota Jakarta Utara
- 273. Kota Jakarta Selatan
- 274. Kabupaten Badung
- 275. Kabupaten Bangli
- 276. Kabupaten Buleleng
- 277. Kabupaten Gianyar
- 278. Kabupaten Jembrana
- 279. Kabupaten Karangasem
- 280. Kabupaten Badung
- 281. Kabupaten Tabanan
- 282. Kota Denpasar
- 283. Kabupaten Bengkayang
- 284. Kabupaten Kapuas Hulu
- 285. Kabupaten Kayong Utara
- 286. Kabupaten Ketapang
- 287. Kabupaten Kubu Raya
- 288. Kabupaten Landak

-19-

- 289. Kabupaten Mempawah
- 290. Kabupaten Melawi
- 291. Kabupaten Sambas
- 292. Kabupaten Sanggau
- 293. Kabupaten Sekadau
- 294. Kabupaten Sintang
- 295. Kota Pontianak
- 296. Kota Singkawang
- 297. Kabupaten Barito Selatan
- 298. Kabupaten Barito Timur
- 299. Kabupaten Barito Utara
- 300. Kabupaten Gunung Mas
- 301. Kabupaten Kapuas
- 302. Kabupaten Katingan
- 303. Kabupaten Kotawaringin Barat
- 304. Kabupaten Kotawaringin Timur
- 305. Kabupaten Lamandau
- 306. Kabupaten Murung Raya
- 307. Kabupaten Pulang Pisau
- 308. Kabupaten Seruyan
- 309. Kabupaten Sukamara
- 310. Kota Palangka Raya
- 311. Kabupaten Mahakam Ulu
- 312. Kabupaten Berau
- 313. Kutai Barat
- 314. Kabupaten Kutai Kertanegara
- 315. Kabupaten Kutai Timur
- 316. Kabupaten Paser
- 317. Kabupaten Penajam Paser Utara
- 318. Kota Balikpapan
- 319. Kota Bontang
- 320. Kota Samarinda
- 321. Kabupaten Balangan

-20-

- 322. Kabupaten Banjar
- 323. Kabupaten Batola
- 324. Kabupaten Hulu Sungai Selatan
- 325. Kabupaten Hulu Sungai Tengah
- 326. Kabupaten Hulu Sungai Utara
- 327. Kabupaten Kota Baru
- 328. Kabupaten Tabalong
- 329. Kabupaten Tanah Bumbu
- 330. Kabupaten Tanah Laut
- 331. Kabupaten Tapin
- 332. Kabupaten Banjarbaru
- 333. Kota Banjarmasin
- 334. Kabupaten Bulungan
- 335. Kabupaten Malinau
- 336. Kabupaten Nunukan
- 337. Kabupaten Tana Tidung
- 338. Kota Tarakan
- 339. Kabupaten Bima
- 340. Kabupaten Dompu
- 341. Kabupaten Lombok Barat
- 342. Kabupaten Lombok Tengah
- 343. Kabupaten Lombok Timur
- 344. Kabupaten Lombok Utara
- 345. Kabupaten Sumbawa
- 346. Kabupaten Sumbawa Barat
- 347. Kota Bima
- 348. Kota Mataram
- 349. Kabupaten Alor
- 350. Kabupaten Belu
- 351. Kabupaten Ende
- 352. Kabupaten Flores Timur
- 353. Kabupaten Kupang
- 354. Kabupaten Lembata

-21-

355.	Kabupaten	Malaka
555.	κασυραίστ	ινιαιακα

- 356. Kabupaten Manggarai
- 357. Kabupaten Manggarai Barat
- 358. Kabupaten Manggarai Timur
- 359. Kabupaten Nagekeo
- 360. Kabupaten Ngada
- 361. Kabupaten Rote Ndao
- 362. Kabupaten Sabu Raijua
- 363. Kabupaten Sikka
- 364. Kabupaten Sumba Barat
- 365. Kabupaten Sumba Barat Daya
- 366. Kabupaten Sumba Tengah
- 367. Kabupaten Sumba Timur
- 368. Kabupaten Timor Tengah Selatan
- 369. Kabupaten Timor Tengah Utara
- 370. Kota Kupang
- 371. Kabupaten Boalemo
- 372. Kabupaten Bone Bolango
- 373. Kabupaten Gorontalo
- 374. Kabupaten Gorontalo Utara
- 375. Kabupaten Pohuwato
- 376. Kota Gorontalo
- 377. Kabupaten Mamasa
- 378. Kabupaten Majene
- 379. Kabupaten Mamuju
- 380. Kabupaten Mamuju Tengah
- 381. Kabupaten Mamuju Utara
- 382. Kabupaten Polewali Mandar
- 383. Kabupaten Bantaeng
- 384. Kabupaten Barru
- 385. Kabupaten Bone
- 386. Kabupaten Bulukumba
- 387. Kabupaten Enrekang

-22-

- 388. Kabupaten Gowa
- 389. Kabupaten Jeneponto
- 390. Kabupaten Kepulauan Selayar
- 391. Kabupaten Luwu
- 392. Kabupaten Luwu Timur
- 393. Kabupaten Luwu Utara
- 394. Kabupaten Maros
- 395. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
- 396. Kabupaten Pinrang
- 397. Kabupaten Sidenreng Rappang
- 398. Kabupaten Sinjai
- 399. Kabupaten Soppeng
- 400. Kabupaten Takalar
- 401. Kabupaten Tana Toraja
- 402. Kabupaten Toraja Utara
- 403. Kabupaten Wajo
- 404. Kota Makassar
- 405. Kota Palopo
- 406. Kota Parepare
- 407. Kabupaten Bombana
- 408. Kabupaten Buton
- 409. Kabupaten Buton Selatan
- 410. Kabupaten Buton Tengah
- 411. Kabupaten Buton Utara
- 412. Kabupaten Kolaka
- 413. Kabupaten Kolaka Timur
- 414. Kabupaten Kolaka Utara
- 415. Kabupaten Konawe
- 416. Kabupaten Konawe Kepulauan
- 417. Kabupaten Konawe Selatan
- 418. Kabupaten Konawe Utara
- 419. Kabupaten Muna
- 420. Kabupaten Muna Barat

-23-

- 421. Kabupaten Wakatobi
- 422. Kota Baubau
- 423. Kota Kendari
- 424. Kota Palu
- 425. Kabupaten Banggai
- 426. Kabupaten Banggai Kepulauan
- 427. Kabupaten Banggai Laut
- 428. Kabupaten Buol
- 429. Kabupaten Donggala
- 430. Kabupaten Morowali
- 431. Kabupaten Morowali Utara
- 432. Kabupaten Parigi Moutong
- 433. Kabupaten Poso
- 434. Kabupaten Sigi
- 435. Kabupaten Tojo Una Una
- 436. Kabupaten Tolitoli
- 437. Kota Manado
- 438. Kota Tomohon
- 439. Kota Kotamubagu
- 440. Kota Bitung
- 441. Kabupaten Bolaang Mongondow
- 442. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
- 443. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
- 444. Kabupaten Bolaang Mongondo Utara
- 445. Kabupaten Kepulauan Sangihe
- 446. Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Sitaro
- 447. Kabupaten Kepulauan Talaud
- 448. Kabupaten Minahasa
- 449. Kabupaten Minahasa Selatan
- 450. Kabupaten Minahasa Tenggara
- 451. Kabupaten Minahasa Utara
- 452. Kota Ambon
- 453. Kota Tual

- 454. Kabupaten Buru
- 455. Kabupaten Buru Selatan
- 456. Kabupaten Kepulauan Aru
- 457. Kabupaten Kepulauan Tanimbar
- 458. Kabupaten Maluku Barat Daya
- 459. Kabupaten Maluku Tengah
- 460. Kabupaten Maluku Tenggara
- 461. Kabupaten Seram Bagian Barat
- 462. Kabuparen Seram Bagian Timur
- 463. Kota Ternate
- 464. Kota Tidore Kepulauan
- 465. Kabupaten Halmahera Barat
- 466. Kabupaten Halmahera Tengah
- 467. Kabupaten Halmahera Timur
- 468. Kabupaten Halmahera Selatan
- 469. Kabupaten Halmahera Utara
- 470. Kabupaten Kepulauan Sula
- 471. Kabupaten Pulau Morotai
- 472. Kabupaten Pulau Taliabu
- 473. Kota Jayapura
- 474. Kabupaten Jayapura
- 475. Kabupaten Biak Numfor
- 476. Kabupaten Keerom
- 477. Kabupaten Kepulauan Yapen
- 478. Kabupaten Memberamo Raya
- 479. Kabupaten Sarmi
- 480. Kabupaten Supiori
- 481. Kabupaten Waropen
- 482. Kabupaten Manokwari
- 483. Kabupaten Manokwari Selatan
- 484. Kabupaten Fakfak
- 485. Kabupaten Kaimana
- 486. Kabupaten Teluk Wondama

-25-

- 487. Kabupaten Pegunungan Arfak
- 488. Kabupaten Teluk Bintuni
- 489. Kota Sorong
- 490. Kabupaten Sorong
- 491. Kabupaten Sorong Selatan
- 492. Kabupaten Raja Ampat
- 493. Kabupaten Tambrauw
- 494. Kabupaten Maybrat
- 495. Kabupaten Nabire
- 496. Kabuupaten Deiyai
- 497. Kabupaten Dogiyai
- 498. Kabupaten Intan Jaya
- 499. Kabupaten Mimika
- 500. Kabupaten Intan Jaya
- 501. Kabupaten Paniai
- 502. Kabupaten Puncak
- 503. Kabupaten Puncak Jaya
- 504. Kabupaten Jayawijaya
- 505. Kabupaten Lanny Jaya
- 506. Kabupaten Memberamo Tengah
- 507. Kabupaten Nduga
- 508. Kabupaten Pegunungan Bintang
- 509. Kabupaten Tolikara
- 510. Kabuparen Yalimo
- 511. Kabupaten Yahukimo
- 512. Kabupaten Asmat
- 513. Kabupaten Boven Digoel
- 514. Kabupaten Mappi
- 515. Kabupaten Merauke